

PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEBAGAI PENUNJANG KEMAJUAN DI DAERAH PAPUA

Imelda Wenda
SMA N 1 Wamena
imeldawenda@gmail.com

Abstrak

Dalam edisi khusus buletin kami tentang Papua yang terbit pada bulan November 2011, DTE telah memaparkan sejarah panjang dan kelam tentang eksploitasi sumber daya dengan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) di Papua. Saat ini, serangkaian rencana pembangunan baru tengah disorongkan, di bawah upaya pemerintah mencakup seluruh Indonesia untuk mempercepat pembangunan (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)) yang diluncurkan tahun lalu. Serangkaian rencana tambahan khusus untuk Papua kini dipromosikan oleh Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yaitu sebuah unit khusus untuk percepatan pembangunan di Tanah Papua. Pemerintah berharap bahwa UP4B akan berhasil tidak seperti Otonomi Khusus yang gagal dan menyepelkan seruan untuk menangani masalah status politik Papua. Namun dengan masih berlanjutnya kekerasan yang dilakukan negara dan tekanan politik berarti dalam keadaan sekarang ini misi itu sulit mencapai keberhasilan.

Kata Kunci: Pembangunan, Papua

Abstract

In a special edition of our newsletter on Papua published in November 2011, DTE has outlined a long and dark history of resource exploitation with a top-down approach in Papua. Currently, a series of new development plans are being rolled out, under the efforts of the government covering the whole of Indonesia to accelerate development (Master Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI)) launched last year. A series of additional plans specifically for Papua are now promoted by the Papua and West Papua Development Acceleration Unit (UP4B), which is a special unit for accelerating development in the Land of Papua. The government hopes that the UP4B will succeed unlike the failed Special Autonomy and softens calls to address Papua's political status issues. But with the continued violence committed by the state and political pressure means that in the current state of the mission it is difficult to achieve success.

Keywords: Development, Papua

PENDAHULUAN

Pemerintah berkomitmen kuat untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi ketimpangan atau disparitas antara kawasan Barat Indonesia (KBI) dan kawasan Timur Indonesia (KTI), salah satunya di Pulau Papua. Melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR), pemerintah mengurangi tingkat kemahalan yang terjadi di Pulau tersebut yang saat ini terdiri dari dua provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

Pemerintah secara bertahap terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan dan air, dan perumahan permukiman, bahkan beberapa diantaranya menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Daftar Proyek Strategis Nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain, Pembangunan jalan Trans Papua, jalan lintas perbatasan dan menuju lintas batas serta pembangunan Pos Lintas Batas

Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang di Skouw, Jayapura.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi disparitas, sosial, ekonomi dan wilayah. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah.

Tahun 2017, alokasi anggaran infrastruktur untuk Provinsi Papua sebesar Rp4,96 triliun dimana alokasi untuk sumber daya air Rp411 miliar, jalan dan jembatan Rp3,72 triliun, permukiman Rp132 miliar dan perumahan Rp85,7 miliar. Sementara, alokasi Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,64 triliun, terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp343 miliar, jalan dan jembatan Rp1,51 triliun, permukiman Rp129 miliar.

Total alokasi pembangunan infrastruktur dari Kementerian PUPR untuk Pulau Papua mencapai Rp7,6 triliun. Sebagai informasi lokasi pembangunan infrastruktur di Pulau Papua juga didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 sebesar Rp 2,18 triliun. (nr/rsa).

Keseluruhan rencana tingkat nasional untuk mempercepat pembangunan di Indonesia disebut sebagai MP3EI - *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Dokumen besar ini, yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada bulan Mei 2011, mengetengahkan tiga tahapan periode rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025. Tujuannya adalah agar pada saat itu Indonesia bisa berada di peringkat ke-9 perekonomian terbesar di dunia. Landasan rencana ini adalah percepatan pertumbuhan ekonomi yang menitikberatkan investasi sektor swasta dan meningkatkan iklim investasi dengan

memperbaiki atau menghapus peraturan-peraturan yang dapat menghambat proyek.

METODE PENELITIAN

Dua puluh dua kegiatan ekonomi yang dianggap berpotensi tinggi untuk pertumbuhan dijadikan target perhatian khusus dalam delapan program utama, yaitu: pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, dan pengembangan kawasan strategis. Beberapa di antara 22 kegiatan ekonomi potensial yang tercatat adalah bauksit, tembaga, nikel, batubara, minyak dan gas, kayu, kelapa sawit, kakao, karet, pertanian pangan, pariwisata, peralatan pertahanan dan baja.

Rencana ini membagi Indonesia menjadi enam target koridor sesuai dengan karakter masing-masing, namun pada beberapa kasus dapat terjadi tumpang tindih fokus ekonomi. Koridor yang dimaksud adalah: Sumatra sebagai "Sentra produksi dan pengolahan hasil bumi, dan lumbung energi nasional", Jawa sebagai "Pendorong industri dan jasa nasional", Kalimantan sebagai "Pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional, Sulawesi sebagai "Pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, minyak dan gas, dan pertambangan nasional", Bali-Nusa Tenggara sebagai "Pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional", dan Papua-Maluku sebagai "Pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pertumbuhan tahunan PDB nasional dengan penerapan MP3EI diharapkan menjadi sekitar 12,7% secara nasional, dengan pertumbuhan wilayah dalam koridor sebesar 12,9%, serta mengurangi dominasi Jawa di perekonomian Indonesia. Tambahan pembangkit energi listrik yang

dibutuhkan untuk melaksanakan rencana ini diproyeksikan sekitar 90.000 MW pada tahun 2025 dan nilai total investasi diidentifikasi sebesar 4.012 triliun rupiah (USD437 miliar). Kontribusi pemerintah adalah sekitar 10% dari total biaya ini dalam bentuk penyediaan infrastruktur dasar, sementara sisanya akan disediakan oleh BUMN, sektor swasta, serta melalui mekanisme kerja sama pemerintah swasta/KPS (*Public Private Partnership/PPP*)

Pembahasan



Salah satu proyek utama MP3EI adalah proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di bagian selatan Papua—sebuah skema raksasa yang membuka lahan dan merusak penghidupan tradisional masyarakat adat Malind beserta kelompok-kelompok adat lainnya di bagian selatan Papua.

Menurut MP3EI, MIFEE akan mencakup area sebesar 1,2 juta hektare,

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/rencana-besar-untuk-papua>

dan terdiri dari 10 klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP). Prioritas pengembangan jangka pendek (2011-2014) adalah mengembangkan klaster I - IV, yang meliputi area seluas 228.023 ha, di Greater Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian. Prioritas jangka menengah (2015 - 2019), area-area untuk sentra produksi pertanian pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan budi daya air akan dikembangkan di Okaba, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji.

Jangka panjang (2020-2030), area produksi pusat untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang akan dikembangkan di Nakias and Selil. Tanaman pangan terdiri dari beras, jagung, kacang kedelai, sorgum, gandum, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hewan ternak akan terdiri dari ayam, hewan ternak, kambing, dan kelinci. Tebu, karet, dan kelapa sawit adalah tanaman non-pangan yang diidentifikasi akan dikembangkan dalam skema tersebut.

KESIMPULAN

Rencana pengembangan infrastruktur yang dikaitkan dengan MIFEE terdiri dari pembangunan pelabuhan, infrastruktur air dan reklamasi rawa, jalan dan jembatan, pabrik pupuk organik dan proyek ammonia-urea di Tangguh (lihat kotak, di bawah); dan pembangkit listrik biomassa di Merauke dan Tanah Miring.